

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Hapus 471 Bus Transjakarta sebagai Aset

## ► DPRD Ogah Setujui Pengajuan oleh Dishub

### Palmerah, Warta Kota

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajukan penghapusan 471 bus Transjakarta sebagai barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional (KDO). Usulan itu disampaikan melalui rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Rabu (8/3/2023).

Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ismanto mengatakan, penghapusan aset itu dilakukan karena 417 bus tersebut sudah berusia tua. Sejak proses pengajuan penghapusan pada 2018 lalu, umur operasional bus sudah tujuh tahun.

"Yang mau dipindahtanggankan (dihapuskan) ini merupakan bus yang tercatat di Dishub dan bukan termasuk dalam bus yang terkena sengketa," kata Ismanto saat rapat tersebut.

Ismanto merinci, sebanyak 417 bus itu terdiri dari berbagai merek mulai dari Mercedes Benz, Hyundai, Anka, Inobus, Hino, Zhontong, Yutong dan Komodo.

Menurutnya, proses permohonan persetujuan penghapusan 417 unit bus itu telah berlangsung sejak 2018. Namun pembahasan permohonan persetujuan penghapusan dengan Komisi C baru digelar pada Rabu (8/3/2023).

Selama ini, Dishub DKI harus mengajukan permohonan lewat surat dulu kepada beberapa pihak. Dari Badan Pengelola

Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan paparannya, sebanyak 299 unit di antaranya berbahan bakar gas, kemudian sisanya 118 unit bus berbahan bakar solar.

Meski rapat telah digelar, namun Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Alatas menskorsing agenda tersebut sampai Dishub menyajikan data tersebut lebih lengkap.

"Tadi kan diskors sifatnya, nanti BPAD mungkin yang mengkomandani karena kan tadi ada Inspektoral, Biro Hukum, disebut munagkin biro perekonomian, teman-teman (SKPD) yang terkaitlah," jelasnya.

### Ogah Setuju

Sementara itu Komisi C DPRD DKI Jakarta ogah menjadi tukang stempel atau asal menyetujui permohonan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ingin menghapus 417 bus Transjakarta yang terbengkalai dari aset daerah.

Ratusan bus itu tidak dioperasikan buntut dugaan korupsi eks Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono pada 2013 lalu.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S. Andyka menolak menyetujui permohonan Dishub tersebut yang ingin melelang ratusan bus tersebut senilai Rp 23,1 miliar dalam rapat kerja pada Rabu (8/3/2023). Apalagi pengadaan bus tersebut sempat

menimbulkan masalah di era Pristono, hingga dia berujung mendekam di tahanan.

"Bila hukum sudah menyampaikan harus penuh kehati-hatian dan sebagainya, kami kan tidak ingin Komisi C jadi tukang stempel. Nah kalau tukang stempelnya bermasalah, timbul masalah di belakang dan kami tidak ingin seperti itu," kata Andyka.

Andyka mengaku, tahu proses pengadaan bus ini karena sempat ikut mengawasi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Dia juga meminta penjelasan DKI secara komprehensif terkait penyebab ratusan bus yang tak lagi bisa beroperasi sehingga asetnya dihapus dan dilelang hingga Rp 21,3 miliar. (faf)